

**PEMETAAN WILAYAH  
RAWAN SENGKETA PERTANAHAN  
DI KECAMATAN MAMUJU KABUPATEN MAMUJU**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



**Oleh:**

**NURLIA LATIF  
NIM. 11202580/P**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2015**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>INTISARI.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah .....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kebaruan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Pustaka.....	9
1. Identifikasi Wilayah.....	9
2. Pemetaan Tematik.....	11
3. Sengketa dalam Konteks Pertanahan .....	12
4. Sistem Informasi Geografis.....	13
5. Program Aplikasi <i>ArcGIS</i> .....	14
6. Pengharkatan dan Tumpangsusun .....	15
7. Pemetaan Wilayah Rawan Sengketa Pertanahan.....	16

B.	Kerangka Pemikiran.....	17
C.	Hipotesis.....	20
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
A.	Jenis Penelitian .....	21
B.	Lokasi Penelitian .....	21
C.	Jenis dan Sumber Data.....	22
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	23
E.	Variabel Penelitian.....	24
F.	Alur Penelitian.....	28
G.	Teknik Analisis Data.....	31
<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM WILAYAH .....</b>	<b>33</b>
A.	Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Mamuju .....	33
B.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
1.	Kondisi Umum Kecamatan Mamuju .....	36
2.	Penggunaan Tanah.....	37
3.	Penduduk dan Ekonomi .....	39
<b>BAB V</b>	<b>PROSES PEMETAAN KERAWANAN SENGKETA PERTANAHAN .....</b>	<b>41</b>
A.	Pembuatan Peta Variabel Rawan Sengketa.....	41
1.	Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan RTRW.....	42
2.	Peta Penguasaan dan Pemilikan Tanah.....	49
3.	Peta Nilai Tanah .....	53
4.	Peta Tingkat Kemiskinan .....	59
5.	Peta Kepadatan Penduduk.....	64
B.	Pengharkatan Variabel Rawan Sengketa .....	66
C.	Tumpang susun Peta Variabel Rawan Sengketa Pertanahan .....	71
D.	Pembuatan <i>Layout</i> Peta.....	76

<b>BAB VI PERSEBARAN WILAYAH RAWAN SENGKETA</b>	
<b>PERTANAHAN .....</b>	<b>78</b>

<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran .....	82

**DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRACT

Land disputes are one of the land issues which so complex and continuously evolving to this day. Meanwhile the information on the disputed land and prone to disputes still difficult to access by the public, especially in a visual form. Development of information technology makes it possible to realize the provision of spatial information regarding the vulnerability of land disputes. Variables that used in this study to determine the vulnerability of land disputes, namely: suitability of land use with the spatial plan, land tenure and right, land value, the level of poverty and population density. The purpose of this study was to determine the mapping process of vulnerability land disputes as well as areas prone to land disputes in the Sub-district Mamuju, Mamuju District

The method that used in this study is quantitative method with a spatial approach. The analysis technique used is scoring and overlay. Determinant variable insecurity of land disputes are classified and given dignity by the influence of the vulnerability of land disputes. Then doing overlay between these five variables using ArcGIS Software 10.1 for then generated map Prone Land Dispute in Sub-district Mamuju, Mamuju District. Overlay technique that used is Union which collects all the attributes of each variable determinant of vulnerability to land disputes then calculated the total dignity.

Based on the results of research and analysis, it is known 1) by using scoring and overlay techniques can be obtained distribution of areas vulnerable to land disputes. Results of total scores show area with the category of Most Vulnerable covers an area of 0.99%, 68.61% covering Prone category, and Not Prone area of 30.40% of the total area of the Sub-district Mamuju. In this case the vulnerable categories dominate and spread throughout the Sub-district of Mamuju 2) through a data-prone zoning of land disputes in the subdistrict of Mamuju in mind that the area with the category of Most Vulnerable includes the area of Rimuku, Tadui and Bambu Village. Then Prone category covers almost the entire territory of the Sub-district Mamuju but is most prevalent in the region of Mamunyu, Rimuku, and Binanga Village. While the region with category Not Prone most numerous in Bambu, Mamunyu, and Karampuang Village.

Keywords: Mapping, Overlay, Land Dispute

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Tanah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan manusia. Sejak dahulu tanah merupakan kebutuhan hidup paling mendasar bagi manusia. Tanah menjadi fondasi dimana manusia hidup, berkembang biak, dan melakukan segala aktivitasnya sehingga setiap saat manusia berhubungan dan berkaitan erat dengan tanah. Kebutuhan manusia akan tanah pun tidak hanya semasa hidup tetapi bahkan setelah meninggal, manusia membutuhkan tanah sebagai peristirahatan terakhirnya. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya tanah bagi manusia sehingga manusia selalu berusaha untuk menguasai dan memiliki tanah.

Dalam perkembangannya, jumlah manusia terus bertambah sementara ketersediaan tanah cenderung tetap. Kebutuhan manusia akan tanah terus meningkat sedangkan jumlah tanah tersedia sangat terbatas. Pertambahan jumlah penduduk, kelangkaan tanah dan kemunduran kualitasnya, alih fungsi tanah dan semakin tajamnya konflik dalam penggunaan tanah<sup>1</sup> menyebabkan semakin tingginya tingkat kerawanan sengketa pertanahan.

Sengketa tanah merupakan permasalahan pertanahan yang demikian kompleks dan terus menerus berkembang hingga saat ini. Namun masyarakat pada umumnya tidak ingin terlibat ataupun berusaha menghindari tanah sengketa. Hal ini membuat masyarakat membutuhkan informasi mengenai

---

<sup>1</sup> Maria S. W. Soemardjono, *Kebijakan Pertanahan: antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005, hlm. 45-46

tanah-tanah sengketa maupun tanah-tanah rawan sengketa. Namun kendalanya hingga saat ini penyajian data mengenai sengketa pertanahan masih berupa data statistik tanpa ada visualisasi spasial mengenai letak dan sebarannya. Sehingga identifikasi mengenai wilayah rawan sengketa mulai dari wilayah sangat rawan hingga tidak rawan sulit untuk dilakukan kecuali melalui pemetaan.

Berkembangnya teknologi informasi saat ini semakin memudahkan pengguna dalam mendesain berbagai bentuk media informasi dalam format digital. Demikian pula dengan teknologi pemetaan, informasi data tekstual dan spasial dapat diintegrasikan dalam satu kesatuan melalui berbagai aplikasi pemetaan berbasis digital yang disebut dengan istilah Sistem Informasi Geografis (SIG).

Melalui aplikasi SIG, penyajian informasi geospasial mengenai kerawanan sengketa pertanahan sangat dimungkinkan karena kemampuannya dalam menganalisis data spasial. Analisis kewilayahan dapat dilakukan melalui teknik pengharkatan dan tumpangsusun. Dalam teknik pengharkatan dan tumpangsusun ini diperlukan beberapa peta tematik dalam proses analisisnya.<sup>2</sup> Peta-peta tematik yang digunakan dalam hal ini yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat kerawanan sengketa pada suatu wilayah.

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju (selanjutnya disebut Kantah Kab. Mamuju), pengelolaan data mengenai sengketa pertanahan masih dilakukan secara manual dalam bentuk skrip dan belum terkomputerisasi. Peta

---

<sup>2</sup> Eko Budiyanto, *Sistem Informasi Geografis dengan ArcView GIS*, Andi Offset, Yogyakarta, 2010, hlm. 117

menyangkut kerawanan sengketa maupun persebaran sengketa belum tersedia sehingga pada saat masyarakat, pemerintah maupun swasta membutuhkan informasi mengenai kerawanan sengketa sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan, pihak Kantor Pertanahan kesulitan dalam memberikan jawaban. Sementara itu, sengketa pertanahan di Kabupaten Mamuju terus terjadi. Adapun data sengketa pertanahan yang ditangani oleh Kantah Kab. Mamuju dari tahun 2012 hingga tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 1. Dari keseluruhan data perkara selama 3 (tiga) tahun tersebut, 71,1% diantaranya terletak di Kecamatan Mamuju dengan tipologi sengketa antara lain sengketa penguasaan dan pemilikan, sengketa batas bidang tanah, sengketa pelaksanaan putusan pengadilan, sengketa penetapan hak dan pendaftaran tanah.

Tabel 1. Data Penanganan Sengketa Pertanahan Kantah Kab. Mamuju

<b>Tahun</b>	<b>Perkara</b>	<b>Tipologi Sengketa</b>
2012	19	Penguasaan dan pemilikan, sengketa batas bidang tanah, sengketa pelaksanaan putusan pengadilan, sengketa pendaftaran tanah.
2013	9	Penguasaan dan pemilikan, sengketa pendaftaran tanah
2014	17	Penguasaan dan pemilikan, sengketa batas bidang tanah, sengketa pelaksanaan putusan pengadilan, sengketa penetapan hak dan pendaftaran tanah.
<b>Jumlah</b>	<b>45 Perkara</b>	

Sumber: Laporan Tahunan Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantah Kab. Mamuju (2012-2014)

Di sisi lain, terjadinya penambahan jumlah penduduk yang pesat dan terbatasnya ketersediaan tanah menyebabkan terjadinya peningkatan harga tanah yang tidak terkontrol di Kabupaten Mamuju terutama di Kecamatan



Mamuju. Kecamatan Mamuju yang terdiri dari 8 (delapan) kelurahan/desa dikenal sebagai sentra kegiatan pemerintahan dan perekonomian. Hal ini menjadikan wilayah ini menjadi wilayah yang sangat strategis. Pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi pekarangan pun tidak dapat terhindarkan akibat terbatasnya ketersediaan tanah. Hal ini menyebabkan kondisi Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sangat rentan terhadap sengketa pertanahan.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Pemetaan Wilayah Rawan Sengketa Pertanahan di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemetaan kerawanan sengketa pertanahan di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju?
2. Wilayah mana sajakah yang rawan sengketa pertanahan di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju?

## **C. Batasan Masalah**

1. Identifikasi tingkat kerawanan sengketa pertanahan dilakukan melalui analisis spasial variabel-variabel yang menyebabkan terjadinya kerawanan sengketa pertanahan.

2. Variabel-variabel yang mempengaruhi kerawanan sengketa kemudian disajikan dalam peta kerawanan sengketa pertanahan melalui teknik pengharkatan dan tumpangsusun.
3. Variabel-variabel yang digunakan dalam identifikasi rawan sengketa pertanahan yaitu menyangkut aspek spasial dan aspek nonspasial.
4. Aspek spasial yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penggunaan Tanah, Rencana Tata Ruang, Nilai Tanah, Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah.
5. Aspek nonspasial yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat kemiskinan dan tingkat kepadatan penduduk.
6. Aspek-aspek lain yang mempengaruhi kerawanan sengketa dalam suatu wilayah seperti aspek politik dan budaya tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui proses pemetaan kerawanan sengketa pertanahan di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju
- b. Mengetahui wilayah-wilayah rawan sengketa pertanahan di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan pertanahan terutama dalam hal analisis wilayah rawan sengketa pertanahan.
- b. Peta Rawan Sengketa Pertanahan dapat digunakan sebagai sarana dalam penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam bidang pertanahan sesuai dengan kondisi suatu wilayah yang rawan terhadap sengketa pertanahan.

## **E. Kebaruan Penelitian**

Untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya maka dibuat kebaruan penelitian (*Novelty*). Kebaruan penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Judul Penelitian Nama Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian dan Pendekatan	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1	Pemanfaatan Citra Satelit Quickbird untuk Pemodelan Rawan Sengketa Pertanahan di Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta Wiwid Nugroho, 2008 Skripsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui kemampuan citra satelit Quickbird untuk identifikasi variabel-variabel fisik terhadap fenomena yang ada di perkotaan</li> <li>2. Menyajikan pemodelan spasial berupa Peta Rawan Sengketa Pertanahan</li> <li>3. Membuat Peta Rawan Sengketa Pertanahan berdasarkan sumber data utama citra satelit Quickbird</li> </ol>	Eksperimen Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa variabel-variabel aksesibilitas, kepadatan bangunan, pembangunan/perkembangan kota, yang mempengaruhi kerawanan sengketa pertanahan dapat diinterpretasi dari citra Quickbird</li> <li>2. Pemodelan rawan sengketa pertanahan melalui pemanfaatan citra satelit Quickbird dapat dilakukan dengan cara pengharkatan dan overlay peta-peta hasil interpretasi citra</li> <li>3. Penyajian rawan sengketa pertanahan disajikan dalam bentuk peta dengan simbol warna dan pembagian kelas sangat rawan, cukup rawan dan tidak rawan menggunakan sistem koordinat TM-3 dengan skala 1:5000</li> </ol>
2	Pembuatan Program Aplikasi Sistem Informasi Geografis untuk Visualisasi Penyebaran Sengketa Pertanahan (Studi di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat) Asep Assafah, 2009 Skripsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui proses pembuatan program aplikasi SIG untuk visualisasi penyebaran sengketa pertanahan</li> <li>2. Mengetahui kegunaan program aplikasi SIG untuk visualisasi penyebaran sengketa pertanahan</li> </ol>	<i>Research and Development</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pembuatan aplikasi SIG untuk visualisasi penyebaran sengketa pertanahan terdiri dari beberapa tahapan.</li> <li>2. Kegunaan aplikasi SIG untuk visualisasi penyebaran sengketa pertanahan yaitu sangat membantu dalam pelaksanaan gelar perkara, dapat digunakan untuk mengetahui persebaran permasalahan di wilayah kelurahan, dapat menunjang kelengkapan data pertanahan, dan dapat digunakan untuk menyajikan informasi mengenai sengketa, konflik ban perkara pertanahan.</li> </ol>
3	Analisis Spasial Masalah Pertanahan di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Adnin, 2012 Skripsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun informasi masalah pertanahan dengan menggunakan aplikasi SIG di Kabupaten Luwu Timur</li> </ol> <p>Mengetahui korelasi masalah pertanahan dengan penggunaan tanah,</p>	Eksploratif Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat dibangun informasi digital masalah pertanahan di Kabupaten Luwu Timur dengan aplikasi SIG</li> <li>2. Variabel penggunaan tanah pemukiman, penggolongan wilayah dan tingkat pengangguran memiliki korelasi dengan masalah pertanahan di Kabupaten Luwu Timur.</li> </ol>

Bersambung.....

Tabel 2. (sambungan)

1	2	3	4	5
		penggolongan wilayah, kepadatan penduduk, pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur		
4	Pemetaan Wilayah Rawan Sengketa Pertanahan Berbasis Sistem Informasi Geografis di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Nurlia Latif, 2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui proses pemetaan kerawanan sengketa pertanahan di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju</li> <li>Mengetahui wilayah mana saja yang rawan sengketa pertanahan di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju</li> </ol>	Kuantitatif Pendekatan Keruangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan peta variabel rawan sengketa pertanahan dapat dilakukan dengan berbagai teknik pemetaan yang tersedia pada aplikasi ArcGIS khususnya menggunakan <i>Analysis Tools</i> pada <i>ArcToolbox</i>. Selain itu pembangunan <i>query</i> menggunakan <i>attribute table</i> sangat memudahkan dalam pembuatan peta dari data nonspasial menjadi data spasial maupun dalam proses analisis data. Kemudian teknik pengharkatan dan tumpangsusun menghasilkan peta rawan sengketa pertanahan dengan pembagian luas kategori Sangat Rawan seluas 0,99%, Rawan seluas 68,61% dan Tidak Rawan seluas 30,40%.</li> <li>Melalui data zonasi rawan sengketa pertanahan di Kecamatan Mamuju diketahui bahwa wilayah dengan kategori Sangat Rawan mencakup wilayah Kelurahan Rimuku, Desa Tadui dan Desa Bambu. Kemudian kategori Rawan mencakup hampir seluruh wilayah Kec. Mamuju namun paling banyak ditemukan di wilayah Kel. Mamunyu, Kel. Rimuku, dan Kel. Binanga. Sedangkan wilayah dengan kategori Tidak Rawan paling banyak terdapat di Desa Bambu, Desa Karampuang dan Kel. Mamunyu.</li> </ol>

## BAB VII

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembuatan peta variabel rawan sengketa pertanahan dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pemetaan yang tersedia pada aplikasi *ArcGIS* khususnya yang terdapat pada *Analysis Tools* dalam *ArcToolbox* seperti *extract clip*, *overlay spatial join*, maupun *overlay union*. Kemudian proses pembuatan peta dari data nonspasial menjadi data spasial dilakukan dengan memanfaatkan fungsi *query* pada *Attribute Table* yang terdapat pada aplikasi *ArcGIS*. Kemudian melalui teknik pengharkatan dan tumpangsusun peta variabel rawan sengketa kemudian menghasilkan peta rawan sengketa pertanahan dengan luasan yang bervariasi. Hasil dari pengharkatan total menunjukkan wilayah dengan kategori Sangat Rawan seluas 0,99%, Rawan seluas 68,61% dan Tidak Rawan seluas 30,40% dari total luas wilayah Kecamatan Mamuju. Luasan tersebut diperoleh dari 423 data zonasi rawan sengketa hasil tumpangsusun.
2. Melalui data zonasi rawan sengketa pertanahan di Kecamatan Mamuju diketahui bahwa wilayah dengan kategori Sangat Rawan mencakup wilayah Kelurahan Rimuku, Desa Tadui dan Desa Bambu. Kemudian kategori Rawan mencakup hampir seluruh wilayah Kec. Mamuju namun paling banyak ditemukan di wilayah Kel. Mamunyu, Kel. Rimuku, dan

Kel. Binanga. Sedangkan wilayah dengan kategori Tidak Rawan paling banyak terdapat di Desa Bambu, Desa Karampuang dan Kel. Mamunyu.

## **B. Saran**

1. Pola keruangan yang terbentuk dalam peta rawan sengketa pertanahan menunjukkan bahwa pola pembangunan Kecamatan Mamuju terkonsentrasi hanya pada satu wilayah kelurahan saja yaitu Kel. Rimuku. Sementara wilayah kecamatan ini cukup luas dengan potensi wilayah cukup baik. Sehingga peta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah setempat dalam penentuan kebijakan pembangunan.
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dalam rangka mengoptimalkan hasil penelitian ini. Seperti penambahan variabel-variabel lain yang mempengaruhi kerawanan sengketa pertanahan maupun pembangunan peta sebaran sengketa pertanahan untuk uji hasil analisis spasial. Selain itu, karena hasil penelitian ini masih bersifat sangat umum, perlu dilakukan pemetaan rawan sengketa dengan skala lebih besar sehingga informasi yang dapat diperoleh lebih detil dan rinci.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnin. (2012). *Analisis Spasial Masalah Pertanahan di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Assafah, Asep. (2009). *Pembuatan Program Aplikasi Sistem Informasi Geografis untuk Visualisasi Penyebaran Sengketa Pertanahan: Studi di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju. (2014). *Mamuju dalam Angka 2014*. Badan Pusat Statistik, Mamuju.
- Bappeda NTB. (2014). *Module ArcGIS 10 Dasar*. <http://bappeda.ntbprov.go.id/data-dan-informasi/edukasi/module-arcgis-10-dasar/> diakses 14 Desember 2014, pukul 22.23 WIB
- BKKB Jatim. *Indikator dan Kriteria Keluarga*. <http://www.bkkbn-jatim.go.id/bkkbn-jatim/html/indikasi.htm> , diakses tanggal 17 Juni 2015 Pukul 23.44 WIB.
- Budyanto, Eko. (2010). *Sistem Informasi Geografis dengan ArcView GIS*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Creswell, John W.(2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Direktorat Pemetaan Tematik. (2012). NSPK: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Survei dan Pemetaan Tematik Pertanahan. Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Petunjuk Teknis Tematik Pertanahan*. Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Direktorat Penatagunaan Tanah. (2013). *Tata Cara Kerja Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah Tahun 2013*. Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Indarto. (2013). *Sistem Informasi Geografis*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Kanwil BPN Prov. Jawa Tengah. (2013). *Geoservice Peta Tematik Pertanahan*. Badan Pertanahan Nasional, Semarang.
- Koordinator Statistik Kecamatan. (2014). *Kecamatan Mamuju dalam Angka 2014*. Badan Pusat Statistik, Mamuju.



- Murad, Rusmadi. (1991). *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Nasikun. (2011). *Sistem Sosial Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Nugroho, Wiwid. (2008). *Pemanfaatan Citra Satelit Quickbird untuk Pemodelan Rawan Sengketa Pertanahan di Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Pemerintah Kabupaten Mamuju. (2014). *Topografi*. <http://www.mamujukab.go.id/statis-8-topografi.html> diakses tanggal 02 Juni 2015 pukul 00.50 WITA.
- Prahasta, Eddy. (2002). *Konsep-Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis*. Informatika, Bandung.
- Saleh, Samsubar. (1998). *Statistik Deskriptif*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Sarjita. (2005). *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Tugujogja Pustaka, Yogyakarta
- Sarjita. (2008). *Penyelesaian Sengketa Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah*. Makalah pada Workshop Penguatan SDM Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman, <http://djitashhum.blogspot.com/2012/03/penyelesaian-sengketa-pertanahan-dalam.html> diakses tanggal 16 Desember 2014 pukul 00.08 WIB.
- Soemardjono, Maria S. W. (2005). *Kebijakan Pertanahan: antara Regulasi dan Implementasi*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Tauchid, Muhammad. (1988). *Masalah Agraria*. Djambatan, Jakarta.
- Tim SIG PT. Geomatik-Konsultan. (2010). *Modul Pelatihan SIG (Sistem Informasi Geografis) ArcGIS*. Penerbit PT. Geomatik-Konsultan, Makassar
- Yunus, Hadi Sabari. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.